

UPAYA KESEJAHTERAAN SOSIAL UNTUK MASYARAKAT SUMENEP: GENDER, KESEHATAN, DAN KEPENULISAN

Ahmad Yasid¹, Akhmad Idris²

Email: ahmad.yasidsaja@stkipgrisumenep.ac.id

¹STKIP PGRI Sumenep

Email: akhmadidris@stkipbim.ac.id

²STKIP Bina Insan Mandiri

Abstrak

Seiring perjalanan waktu, Kabupaten Sumenep mulai berbenah dalam berbagai bidang. Di tengah gempuran era disrupsi seperti ini, beberapa sektor yang perlu dikuatkan adalah gender; kesehatan; dan literasi. Pola superioritas-inferioritas dalam urusan kerja masih langgeng dilakukan. Hal ini dapat dibuktikan dengan viralnya kasus pemecatan seorang pekerja rumah tangga hanya gegara menikmati waktu senggang dengan duduk di kursi meja makan pada tahun 2018 silam. Fakta lainnya juga tak kalah mencengangkan tentang nasib anak-anak perempuan Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh organisasi PBB yang berfokus pada perlindungan hak anak atau yang biasa disebut UNICEF (United Nation Children Fund), satu dari enam anak perempuan Indonesia atau sejumlah 340.000 anak 'dipaksa' menikah sebelum usia delapan belas tahun. Masih terasa hangat juga di dalam ingat berita tentang seorang pemuda yang ditemukan tewas akibat bunuh diri di sebuah apartemen yang berlokasi di Jakarta Barat pada akhir tahun 2021 lalu. Setelah ditelusuri lebih jauh, penyebab tindak bunuh diri tersebut adalah masalah keluarga. Masalah lainnya adalah penguatan budaya. Perpustakaan sebagai tempat yang mengelola dokumen masa lalu untuk menjanjikan masa depan yang penuh dengan harapan, sehingga perpustakaan sangat layak disebut sebagai pusat budaya dan simbol peradaban bangsa. Tulisan ini akan membahas tentang upaya kesejahteraan sosial untuk masyarakat Sumenep.

Kata kunci: Sumenep, Kesejahteraan Sosial, Gender, Kesehatan, dan Literasi

Pendahuluan

Sistem perbudakan telah lama dihapuskan karena melanggar hak-hak asasi kemanusiaan. Tidak heran jika riuh teriakan tentang kesetaraan menggema dengan lantang karena perempuan tidak seharusnya menjadi budak laki-laki. Sayangnya teriakan kesetaraan hanya terdengar lantang dalam urusan gender,

namun terkesan lirih saat berhubungan dengan urusan kerja. Artinya, urusan pekerjaan kerap kali masih dikotakkan. Ada pekerjaan yang dianggap mulia, juga ada pekerjaan yang dianggap 'hina'. Bahkan baru-baru ini sedang viral tentang keengganan memiliki menantu seorang tukang bakso. Sederhana saja, untuk masalah kesetaraan gender



memang sudah mulai menemui (sedikit) titik terang. Namun untuk masalah kesetaraan kerja, agaknya masih terlihat remang-remang. Masih banyak orang yang menganggap bahwa ada pekerjaan yang bersifat superior dan ada yang bersifat inferior. Sebut saja seperti hubungan antara pemilik rumah (yang kerap disebut majikan) dan pekerja rumah tangga (yang kerap disebut pembantu). Perbudakan modern (modern slavery) didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang memperlakukan orang lain sebagai property miliknya, sehingga kemerdekaan orang itu terampas lalu dieksploitasi demi kepentingan orang yang melakukan praktik perbudakan, dalam hal ini orang bisa dipekerjakan dan dibuang begitu saja seperti barang. (Nugraha, 2015).

Ada sebuah fakta yang sangat mencengangkan tentang nasib anak-anak perempuan Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh organisasi PBB yang berfokus pada perlindungan hak anak atau yang biasa disebut UNICEF (United Nation Children Fund), satu dari enam anak perempuan Indonesia atau sejumlah 340.000 anak

‘dipaksa’ menikah sebelum usia delapan belas tahun. Tidak berhenti sampai di sini, UNICEF juga mengungkapkan bahwa setiap tahunnya, sebanyak 50.000 anak menikah dengan usia di bawah lima belas tahun. Padahal fakta yang beredar di jalan-jalan maupun di lembar-lembar koran menyebutkan bahwa semakin muda usia seorang perempuan saat menikah, semakin rentan risiko tentang kesehatan yang harus ditanggung.

Pernyataan ini bukanlah sekadar pena tanpa tinta, sebab Badan Organisasi Dunia atau WHO (World Health Organization) telah memberikan peringatan bahwa kehamilan perempuan-perempuan yang berusia masih muda dapat berisiko terhadap keselamatan ibu sekaligus bayi yang ada di kandungannya. Bahkan komplikasi kehamilan dan persalinan disebut sebagai penyebab kematian nomor dua pada perempuan yang berusia lima belas hingga sembilan belas tahun. Selain itu, Anggiasih dan Ria (2017) mengungkapkan bahwa perempuan-perempuan yang berusia di bawah delapan belas tahun sejatinya memiliki organ reproduksi yang belum siap untuk berhubungan badan lalu mengandung. Oleh sebab itu, hal ini

dapat memicu kemunculan kanker serviks.

Mirisnya lagi, pernikahan anak tidak hanya membahayakan perempuan yang berperan sebagai ibu, tetapi juga mengancam kesehatan bayi yang hendak dilahirkan. Kesehatan anak tidak selalu identik dengan peningkatan berat badan, dalam beberapa kasus didapatkan bahwa anak-anak dari keluarga dengan pendapatan rendah memiliki kelebihan berat badan dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga dengan pendapatan yang tinggi. (Telaumbanua, 2018).

Dengan usia yang masih muda, kondisi fisik ibu hamil masih membutuhkan banyak asupan gizi. Sementara itu, si bayi di dalam kandungan juga memerlukan asupan gizi yang cukup. Akibatnya si bayi tidak memperoleh asupan gizi yang cukup, sehingga otak dan tubuh janin tidak bisa berkembang secara sempurna. Biasanya janin tersebut akan lahir dengan tinggi badan yang relatif pendek, berat badan yang ringan, serta kecerdasan yang di bawah rata-rata. Berbeda dengan bayi yang dilahirkan oleh seorang ibu dengan usia di atas dua puluh satu tahun. Bayi di dalam kandungan ini memiliki

persentase gizi yang lebih cukup. Pada dasarnya pernikahan dinimerupakan ikatan janji suci yang dilakukan oleh wanita dan pria yang berusia kurang dari ketentuan dengan tujuan membina rumah tangga. (Fadilah, 2021).

Sementara dari sisi kejiwaan, remaja cenderung memiliki emosi yang tidak stabil, sehingga (sedikit atau banyak) kondisi ini akan memiliki dampak terhadap fenomena pernikahan anak. Satu di antara dampak yang sangat merugikan perempuan adalah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Jika sudah seperti ini, maka ujung yang dapat ditebak adalah perpisahan. Dengan pengendalian emosi yang masih belum stabil, perceraian di usia muda akan memberikan dampak yang cukup serius pada kondisi kesehatan mental seseorang. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh The National Center for Health Statistics. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa seseorang yang menikah dalam rentang usia dua belas hingga dua puluh satu tahun cenderung mengalami tingkat perceraian tiga kali lipat lebih tinggi daripada orang-orang yang menikah di atas usia tersebut.



Masih terasa hangat di dalam ingat berita tentang seorang pemuda yang ditemukan tewas akibat bunuh diri di sebuah apartemen yang berlokasi di Jakarta Barat pada akhir tahun 2021 lalu. Setelah ditelusuri lebih jauh, penyebab tindak bunuh diri tersebut adalah masalah keluarga. Ia kerap bertengkar dengan dua orang tuanya gegara masalah uang untuk modal usaha. Di sisi lain, orang tuanya berharap kepadanya agar fokus menyelesaikan kuliah terlebih dahulu. Hubungan yang tidak harmonis antara anak dan orang tua ini juga dibuktikan dengan keputusan anaknya yang memilih tinggal di apartemen, padahal rumah orang tuanya juga berada di lokasi yang sama (Jakarta Barat). Pada akhirnya pertengkaran itu kian meruncing, hingga berujung pada tubuh yang bergeming.

Beranjak dari fenomena tersebut, agaknya ada satu hal yang kerap luput dari pengamatan, yaitu faktor yang mendorong seseorang untuk bunuh diri. Hal utama yang kerap disorot dalam tindak bunuh diri adalah menyalahkan pelaku bunuh diri, menghakiminya sebagai tindakan orang-orang yang tidak berpikir, hingga hujatan sebagai orang yang tidak memegang ajaran agama.

Tidak ada yang salah dalam pernyataan-pernyataan tersebut, hanya saja bukankah menelisik penyebab utama bunuh diri menjadi hal yang lebih penting dilakukan untuk mencegah perulangan kembali?

Indonesia sebagai bangsa yang plural – secara otomatis – juga akan menjadi bangsa yang multikultural. Keanekaragaman inilah yang menjadi identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Variasi budaya yang dimiliki tiap-tiap etnis menjadikan Indonesia sebagai Negara dengan keberagaman terbanyak kedua di dunia setelah Papua Nugini (versi Liputan6.com). Kebudayaan bangsa Indonesia sebagai kearifan lokal yang diturunkan secara turun temurun dari para leluhur terdahulu – secara perlahan, namun pasti – mulai tergerus arus modernisasi. Kenyataan bahwa *trend* budaya Barat yang lebih diminati – mulai dari cara berpakaian, cara berbicara, dan cara bergaul – daripada budaya sendiri sudah cukup menjadi bukti bahwa keberlangsungan kebudayaan Indonesia tengah terancam. Satu di antara cara yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah ini adalah kesadaran diri bahwa menjadi orang lain – meniru budaya

bangsa lain – dan meninggalkan jati diri sendiri – melupakan budaya bangsa sendiri – adalah hal yang sama sekali tak dapat dibanggakan.

Lalu, bagaimana jika kesadaran diri tersebut muncul ketika para leluhur telah tiada? Para pelaku dan penjaga budaya yang dulu berpesan tiada bosan agar menjaga warisan leluhur, kini hanya bisa ditemui nama dan kenangan manis ihwal amal perbuatannya. Jika memang manusia telah dihadapkan dengan keadaan pelik seperti ini, maka pintu gerbang yang tersisa untuk memasuki kebudayaan bangsa tersebut adalah perpustakaan. Sebagai tempat yang mengelola dokumen masa lalu untuk menjanjikan masa depan yang penuh dengan harapan, perpustakaan sangat layak disebut sebagai pusat budaya dan simbol peradaban bangsa. Tidak heran jika Sutarno (2006) dalam bukunya yang bertajuk Perpustakaan dan Masyarakat menyebutkan bahwa perpustakaan merupakan hasil budaya dan catatan perjalanan manusia dari masa ke masa.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau kajian pustaka, yang

merupakan pendekatan untuk menganalisis dan menginterpretasikan terhadap hasil-hasil penelitian serta teori-teori yang relevan dengan topik kesejahteraan sosial, gender, kesehatan, dan kepenulisan di Sumenep.

Hasil dan Pembahasan

Kesetaraan Gender, Kesetaraan Kerja, dan Kesehatan

Masih langgengnya pola superioritas-inferioritas dalam urusan kerja dapat dibuktikan dengan viralnya kasus pemecatan seorang pekerja rumah tangga hanya gegara menikmati waktu senggang dengan duduk di kursi meja makan pada tahun 2018 silam. Bagi pemilik rumah, ada jurang pemisah yang dalam antara pemilik rumah dan pekerja rumah tangga. Oleh sebab itu, tempat duduk pun harus berbeda. Seolah-olah pekerja rumah tangga ‘diharamkan’ duduk sejajar dengan pemilik rumah. Pertanyaannya: jika seorang pekerja rumah tangga tidak boleh duduk di kursi, lalu ia harus melepas lelah sejenak di mana? Apakah harus berdiri terus-menerus hingga jam kerja selesai? Atau cukup *atempo* di lantai saja?

Berkaca dari kejadian tersebut, kesetaraan kerja benar-benar perlu disuarakan lebih lantang cuma lebih berjamaah agar kasus pemecatan sepihak seperti kejadian tersebut tidak berulang-ulang kali terjadi. Sudah saatnya setiap orang menyadari bahwa baik pemilik rumah maupun pekerja rumah tangga pada hakikatnya sama-sama saling membutuhkan. Hubungannya dapat dianalogikan sebagai simbiosis mutualisme saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Meskipun pemilik rumah berperan sebagai pihak yang memberikan gaji, tidak berarti pekerja rumah tangga berada di bawahnya dan berhak dilakukan semena-mena. Begitu pula sebaliknya, meskipun pekerja rumah tangga berada diposisi sebagai penerima gaji, tidak berarti pihak yang mendapatkan keuntungan hanya pemilik rumah. Justru keberadaan gaji menjadi bukti bahwa dua belah pihak saling membutuhkan dan saling memberikan keuntungan.

Pelabelan perempuan yang bekerja diluar rumah juga mendapat stereotype yang negatif, sehingga terjadinya diskriminasi serta ketidakadilan yang merugikan. Salah satu contoh yang biasa terjadi

apabila laki-laki marah dianggap hal yang wajar dan sebagai laki-laki yang tegas. Namun disaat perempuan marah di anggap sebagai individu yang emosional dan tidak dapat menahan diri. Perempuan sebagai “ibu rumah tangga” merugikan bagi perempuan yang ingin berkiprah di dunia politik, bisnis, dan birokrat. Laki-laki sebagai pencari nafkah utama sehingga nafkah yang dihasilkan perempuan dianggap sebagai tambahan. (Prastiwi, 2020).

Penjelasan singkatnya seperti ini, pekerja rumah tangga memang membutuhkan ketersediaan pemilik rumah untuk mempekerjakannya demi mencukupi kebutuhan ekonomi. Namun disisi lain, pemilik rumah juga membutuhkan tenaga pekerja rumah tangga untuk membereskan urusan rumah tangga seperti mencuci; memasak; hingga merawat anak-anaknya. Tanpa pekerja rumah tangga, para pemilik rumah akan kebingungan dan bisa berpengaruh terhadap pekerjaannya di luar rumah. Saking butuhnya para pemilik rumah terhadap tenaga pekerja rumah tangga, para pemilik rumah di kota-kota besar siap membayar berkali-kali lipat dari

harga pada umumnya saat hari raya (biasanya para pekerja rumah tangga tetapnya sedang pulang kampung). Jika sudah seperti ini, maka yang terlihat dengan jelas adalah tidak ada tinggi maupun rendah dalam pekerjaan, sebab yang ada yaitu saling membutuhkan serta saling memberi keuntungan.

Konsep seperti ini juga berlaku untuk hubungan pekerjaan di sektor apapun. Sebut saja seperti hubungan antara *owner*, manajer, dan karyawan. Tiga-tiganya pada dasarnya setara dalam hal tinggi maupun rendah, sebab yang membedakan di antara tiga posisi tersebut adalah tanggung jawab. Meskipun *owner* berperan sebagai pemilik, tidak berarti *owner* tidak membutuhkan manajer. Begitu pun seterusnya hingga jatuh pada bagian karyawan. *Owner* membutuhkan manajer, lalu manajer membutuhkan karyawan, dan begitu pula karyawan. Pada akhirnya hubungan timbal balik tersebut membentuk lingkaran yang saling berkelindan untuk memberikan penyadaran bahwa semuanya sama-sama membutuhkan sekaligus menguntungkan.

Setara dalam Pandangan Maupun Pelayanan

Ketika pandangan seseorang mulai terbuka bahwa tidak ada superioritas-inferioritas dalam urusan pekerjaan, maka secara otomatis akan muncul kesadaran bahwa pelayanan yang diterima oleh pekerja juga harus setara. Selama ini (entah mau diakui atau tidak) pekerja yang mendapatkan jaminan sosial hanya pekerja disektor formal, berbeda dengan para pekerja disektor informal maupun nonformal. Para pekerja yang bernaung dalam sebuah perusahaan diberikan sebuah jaminan yang meliputi jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, pensiun, tunjangan hari tua, hingga kematian. Berbeda dengan para pekerja rumah tangga yang hanya diberikan gaji dengan nominal yang 'lumayan' jauh dari pekerja-pekerja di sektor formal. Alih-alih mendapatkan jaminan kesehatan seperti pemeriksaan dalam kurun waktu tertentu (yang dibiayai oleh pemilik rumah), mendapatkan gaji tanpa potongan dan diberikan jatah libur mingguan serta libur hari raya saja sudah untung-untungan. Kebanyakan tak bisa berharap banyak dengan Tunjangan Hari Raya (meskipun



banyak juga yang memberikan THR) kecuali dalam bentuk bingkisan yang kira-kira jika dinominalkan mungkin sepersepuluh gajinya.

Padahal jika mau direnung lebih jauh, pekerja rumah tangga adalah pekerja yang paling rentan mendapatkan kerugian digaji rendah dan kerap mengalami kekerasan. Tidak terhitung berapa banyak kasus kekerasan yang menimpa para pekerja rumah tangga, hingga peringatan Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional (setiap 15 Februari) pun diilhami dari tragedi kekerasan terhadap pekerja rumah tangga anak yang bernama Sunarsih saat masih berusia 14 tahun. Bayangkan saja, sudah gajinya rendah dan kerap kali dianiaya, malah tidak diberikan jaminan kesehatannya. Semenyakitkan inikah menjadi pekerja rumah tangga? Sementara dari sisi kesehatan, para pekerja rumah tangga (yang kebanyakan perempuan karena dianggap lebih telaten dan ulet daripada laki-laki) seringkali mengalami kelelahan kronis. Dilansir dari suaramerdeka.com¹, seorang pekerja rumah tangga perempuan biasa bekerja selama 4 hingga

8 jam setiap harinya. Dengan pola kerja yang seperti ini, para pekerja rumah tangga disebut wajar jika terserang kelelahan kronis sebab pekerjaan yang tiada henti setiap hari. Oleh sebab itu, pekerja rumah tangga memang dapat disebut rentan mengalami gangguan kesehatan. Atas dasar inilah, para pekerja rumah tangga sudah seyogianya mendapatkan jaminan kesehatan yang berupa pemeriksaan kesehatan secara berkala meskipun tidak diawali dengan keluhan.

Akhir kata, nasihat lama itu memang benar, bahwa perlakukanlah seseorang sebagaimana engkau ingin diperlakukan. Jika pemilik rumah ingin dilayani dengan baik oleh pekerja rumah tangganya, maka perlakukanlah pekerja rumah tangga dengan baik pula. Karena pekerja rumah tangga yang haknya terjamin dan kesehatannya terjaga dengan baik, akan memberikan pelayanan terbaiknya.

Jika ditelisik lebih jauh, dua hal utama yang membuat pernikahan anak tetap marak terjadi di Indonesia adalah konstruksi patriarki dan kebijakan pemerintah. Posisi perempuan di

beberapa daerah masih saja diletakkan sebagai pihak yang harus mengangguk ketika dijodohkan dengan laki-laki yang tidak dicintainya. Belum lagi embel-embel pamali yang kian menjeruji kebebasan perempuan. Sebut saja pamali menolak lamaran laki-laki, nanti bisa seret jodoh. Pada akhirnya, perempuan dengan 'berat hati' menerima lamaran itu padahal sekolah menengah atas saja belum tuntas.

Budaya ini sempat disindir 'habis-habisan' oleh film Yuni (dan juga novelnya) yang selalu menempatkan perempuan di pihak yang tidak diuntungkan dalam semua hal, terlebih masalah perjodohan dan pendidikan. Keperawanan dianggap aib jika hal itu masih dimiliki diusia yang sudah 'matang' bukankah yang menjadi aib adalah menjadi tidak perawan tanpa ikatan pernikahan? Akhirnya, pernikahan anak tetap terjadi untuk menghindari sebutan perawan tua. Belum lagi tentang kebijakan pemerintah mengenai batas minimal pernikahan yang mematok di usia enam belas tahun berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974. Namun kabar baiknya, Undang-Undang itu direvisi dengan UU Nomor 16 Tahun

2019 yang menyebutkan bahwa batas minimal usia pernikahan adalah sembilan belas tahun. Karena revisinya 'sangat' telat, dalam rentang waktu hingga tahun 2019 tak ada peraturan resmi yang benar-benar mengikat pernikahan anak di bawah umur. Meskipun pemerintah telah merevisi, BKKBN dan BP4 menyatakan bahwa usia ideal menikah adalah 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki.

Pada akhirnya, hal yang seharusnya ditumbuh kembangkan adalah kesetaraan. Jika laki-laki memiliki kebebasan untuk menentukan waktu pernikahan, maka hal yang serupa juga seharusnya dimiliki oleh perempuan. Jika bujang tua masih dianggap biasa, maka hal yang sama juga berlaku untuk perawan. Kesetaraan inilah yang nanti dapat berujung pada kesejahteraan bersama. Kurang lebih seperti itu.

Kesehatan fisik agaknya memang lebih diperhatikan daripada kesehatan mental. Hal ini dapat diamati pada kasus-kasus bunuh diri yang sekadar menjadi laporan 'angin lalu'. Berbeda dengan kasus pembunuhan yang cenderung disorot habis-habisan, kasus kopi sianida



menjadi satu di antara contohnya. Penyebabnya secara garis besar sebenarnya sederhana, yaitu luka fisik lebih diperhatikan karena dapat diamati dengan lima panca indra. Berbeda dengan luka batin, luka psikis, luka mental yang tidak bisa 'ditelanjangi' oleh mata maupun indra lainnya. Padahal justru yang tidak terlihat biasanya memiliki dampak yang lebih berbahaya, karena serangannya terkesan hening; sunyi; sepi, namun langsung menikam dengan tajam.

Tidak jauh berbeda dengan kasus bunuh diri pemuda Jakarta Barat tersebut. Karena tragedi bunuh diri yang sebagian besar disebabkan depresi, maka terkesan sebagai kasus yang tidak perlu ditelisik lebih jauh. Depresi ya tetap dianggap depresi, sebuah perasaan tertekan yang menjadi urusan personal bukan urusan publik. Jika bersedia menalar lebih jauh antara bunuh diri sebagai akibat dan depresi sebagai sebab, maka seharusnya yang lebih mendapat perhatian adalah depresinya. Bukankah setiap hal yang terjadi selalu dicari sebabnya? Karena sebab yang menjadi sumber. Oleh sebab itu, depresi adalah masalah kita bersama. Seringkali seseorang merasa tertekan

dengan masalah di rumah, tetapi mendapatkan 'penawar' kala berkumpul dengan teman-teman tongkrongan dan orang-orang sekitar. Jika di rumah seperti penjara, lalu di luar rumah ibarat neraka, maka 'surga' lah yang akhirnya menjadi tempatnya pulang dalam versi yang 'dipaksakan'. Jadi, masihkah kita menganggap remeh kesehatan mental?

Harta yang Paling Berharga

Melalui kasus bunuh diri pemuda Jakarta Barat tersebut, siapapun akan belajar bahwa lirik lagu yang melegenda dari film Keluarga Cemara itu memang benar adanya. Hidup glamor di apartemen nyatanya masih belum membuat orang bahagia saat memiliki masalah dengan keluarga. Bahkan SPTK (Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada Desember 2021 menunjukkan bahwa orang miskin tidak selalu susah dan orang kaya tidak selalu bahagia. Artinya, kekayaan bukanlah tolok ukur kebahagiaan. Dua gunung emas tidak akan menjamin kebahagiaan manusia, namun saya yakin senyuman bapak dan mamak setiap pagi akan mampu

menghangatkan hati yang dingin sekalipun.

Perpustakaan, Kebudayaan, dan Literasi Pelestarian Budaya Berbasis *Culture Knowledge*

Budaya menjadi 'harta warisan' yang paling bernilai tinggi, sebab dari budaya *lah* dapat dipahami keadaan masyarakat serta kepribadian & jati diri suatu bangsa. Oleh sebab itu, menjaga kelestariannya sama saja dengan menjaga jati diri bangsa itu sendiri. Berkaitan dengan hal ini, terdapat kabar baik bahwa Perpustakaan Nasional milik bangsa Indonesia memiliki koleksi budaya dari seluruh penjuru wilayah Indonesia. Sesuai dengan fungsi perpustakaan secara umum sebagai ilmu pengetahuan, teknologi, sumber informasi, dan kebudayaan berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Fungsi kultural perpustakaan membuat perpustakaan secara tidak langsung menciptakan masyarakat yang terbiasa membaca, terpelajar, dan berbudaya tinggi. Sederhananya, keberadaan perpustakaan merupakan cara Negara melindungi dan melestarikan kebudayaannya.

Perpustakaan menjadi salah satu pelestari budaya yang berbasis *culture knowledge*. Sendjaja (1994) dalam karyanya yang berjudul Teori Komunikasi mengungkapkan bahwa upaya melestarikan budaya dapat ditempuh dengan menggunakan dua cara, yakni *culture experience* dan *culture knowledge*. Pelestarian budaya berbasis *culture experience* dilakukan dengan cara terjun langsung lewat sebuah pengalaman kultural di lapangan. Upaya jenis ini 'memaksa' pelestari budaya (dalam hal ini manusia, karena yang bisa merasakan pengalaman kultural hanya makhluk yang memiliki nyawa sekaligus rasa) untuk mengikuti dan berkontribusi dalam acara kebudayaan, seperti kegiatan tarian, upacara adat; maupun tradisi lokal setempat. Sebab turut serta dan kontribusi tersebut, diharapkan eksistensi budaya tetap bersambung hingga ke generasi selanjutnya.

Sementara jenis pelestarian budaya yang kedua berbasis *culture knowledge* dilaksanakan dengan cara membentuk pusat informasi kebudayaan yang bertujuan untuk fungsi edukasi, pengembangan budaya, dan fungsi potensi pariwisata daerah. Melalui pusat



informasi ini, para pebelajar bisa dengan mudah menambah wawasan pengetahuannya tentang kebudayaan daerah tertentu; para pelaku budaya bisa mengembangkannya menjadi lebih inovatif, kreatif, serta adaptif; dan para wisatawan menjadi lebih mudah dalam mengatur destinasi wisata-wisata daerah berbasis kearifan lokal yang ingin dikunjungi. Jenis upaya pelestarian ini mampu dijalankan dengan cukup baik oleh perpustakaan. Sebagai lembaga yang memiliki 'spesialis' dalam bidang pencatatan; perekaman; dan penyimpanan, perpustakaan menjadi 'pintu gerbang' yang tepat untuk memahami dan menikmati kebudayaan bangsa Indonesia yang sangat indah dengan keberagamannya di tengah gempuran budaya global yang 'sangat kejam' dengan kebebasannya.

Perpustakaan: Mengikuti, Melawan, atau *justru* Memegang Kendali Arus Globalisasi?

Milan Kundera, seorang novelis asal Republik Ceko pernah mengatakan bahwa cara mudah menghancurkan sebuah bangsa adalah memusnahkan semua buku-bukunya. Agaknya Milan

Kundera ingin mengisyaratkan bahwa buku merupakan bagian vital sebuah bangsa, sebab buku menunjukkan buah peradaban bangsa. Bangsa yang kehilangan buku-bukunya, tidak lebih dari sekadar sekelompok manusia yang hidup tanpa tahu dirinya siapa. Oleh sebab itu, (seharusnya sudah jelas) instrumen fundamental dari sebuah Negara yang perlu dikelola dengan baik untuk menjaga peradaban bangsa adalah tempat penyimpanan koleksi buku khususnya yang berkaitan dengan sejarah dan budaya bangsa dari masa ke masa yang tidak lain adalah perpustakaan.

Tidak hanya ihwal sejarah dan budaya bangsa, perpustakaan juga menjadi faktor utama dalam realisasi tujuan pendidikan. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 43 tahun 2007 bahwa fungsi perpustakaan sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi guna meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Oleh sebab itu, keberadaan perpustakaan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan intelektualitas lewat koleksi buku-buku di dalamnya. Perkembangan zaman yang

terus melaju tiada henti terbukti dengan perpindahan dari era revolusi industri 4.0 menuju ke arah *society* 5.0 – membuat perpustakaan harus mengambil sikap, yakni melawan arus atau mengikuti arus. *Sejatinya*, masih ada alternatif lain selain melawan atau mengikuti, yakni ‘memegang kendali’. Artinya perpustakaan tidak harus menolak era ‘keterbukaan informasi’ dengan cara *keukeuh* terhadap model konvensional (sistem manual) atau tidak *melulu* terbawa arus dengan cara menonaktifkan pelayanan secara manual dan beralih pada mode dalam-jaringan secara total.

Perpustakaan masih bisa mengambil alternatif dengan cara ‘memegang kendali’ arus globalisasi lewat memanfaatkan ‘era keterbukaan informasi’, bukan malah sebaliknya (dimanfaatkan). Cara ‘memegang kendali’ adalah tetap mengaktifkan pelayanan secara manual di dalam gedung perpustakaan untuk mengantisipasi *trouble* atau *error function* pada sistem dalam jaringan sekaligus mengembangkan teknologi berbasis digital guna menyiasati generasi muda yang telanjur cinta dengan ‘sistem kenyamanan’ lewat aplikasi berbasis

android maupun *os*. Perpustakaan Nasional sendiri telah meluncurkan aplikasi yang diberi nama ‘ipusnas’, namun juga tidak mengabaikan fasilitas gedung – terbukti dengan pembangunan *press corner perpustakaan*. Pada kenyataannya, manusia yang telanjur cinta modernisasi akan merindukan hal-hal yang bernuansa budaya lokal terbukti dengan larisnya kafe-kafe dengan konsep bangunan khas budaya lokal maupun konsep persawahan, sungai, dan nongkrong di tengah hutan. Berkeliling dari rak ke rak selanjutnya, mencari tempat duduk ternyaman untuk membaca buku, menghirup aroma khas kertas di buku lama lalu membedakannya dengan kertas di buku baru, serta bertemu dengan orang-orang baru bahkan teman-teman lama di perpustakaan cepat atau lambat akan kembali dirindukan oleh generasi rebahan yang hanya ‘menikmati’ koleksi perpustakaan lewat genggaman tangan.

Sebuah Simpulan Ringan

Akhir kata, perpustakaan beserta buku sebagai koleksi utamanya memang layak disebut sebagai pusat budaya bangsa karena menjadi pelestari budaya berbasis *culture knowledge* sekaligus patut disebut



sebagai simbol peradaban bangsa karena menjadi wahana pendidikan dan informasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan sebuah bangsa.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian literatur mengenai Upaya Kesejahteraan Sosial untuk Masyarakat Sumenep: Gender, Kesehatan, dan Kepenulisan, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan sosial di Sumenep dipengaruhi oleh berbagai faktor multidimensi, termasuk gender, akses terhadap layanan kesehatan, dan peran kepenulisan. Dari perspektif gender, perempuan di Sumenep masih menghadapi tantangan untuk mendapatkan akses yang setara terhadap pelayanan kesehatan dan peluang ekonomi. Kesenjangan ini berdampak pada kualitas hidup dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Sementara itu, isu kesehatan di Sumenep menunjukkan adanya kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan layanan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan, seperti perempuan dan anak-anak. Selain itu, kepenulisan sebagai media ekspresi dan pemberdayaan telah memberikan kontribusi positif dalam

meningkatkan kesadaran masyarakat akan isu-isu kesehatan dan kesejahteraan sosial. Peran perempuan sebagai penulis juga terbukti dapat memperkuat suara mereka dalam advokasi kesehatan dan sosial, yang penting untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

Saran

Diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Sumenep melalui pendekatan yang lebih inklusif dan berkeadilan gender. Pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan yang memberikan akses yang setara bagi perempuan terhadap layanan kesehatan dan peluang ekonomi. Selain itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk mendukung program literasi dan kepenulisan yang fokus pada pemberdayaan perempuan, agar mereka dapat lebih aktif dalam menyuarakan isu-isu yang mempengaruhi kesejahteraan sosial.

Daftar Pustaka

- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Jurnal PAMATOR*, 14 No. 2(Dampak Pernikshsn Dini). <http://journal.trunojoyo.ac.id/pamator>
- Nugraha, M. T. (2015). Perbudakan Modern (Modern Slavery) (Analisis Sejarah dan Pendidikan). *At-Turats*, Vo. 9 No. 1
- Prastiwi, I. L. R. (2020). Polemik Dalam Karir Perempuan Indonesia. *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, Vol 4 No.1
- Telaumbanua, M. M. (2018). Faktor yang Mempengaruhi Upaya Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial. *Jurnal PKS*, 17 No 3.
- Kartikasari, D., & dkk. (2017). Semai Untuk Keadilan dan Demokrasi. *Koalisi Perempuan Indonesia*, 48. www.koalisiperempuan.or.id
- Sendjaja, S. D. (1994). *Teori Komunikasi*. Universitas Terbuka.
- Sutarno. (2006). *Perpustakaan dan Masyarakat (Pertama)*. Sagung Seto.